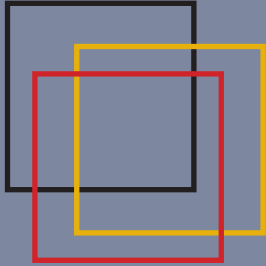




Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Organisasi
Perburuhan
Internasional



SAMASAMA: SOCIAL ACCOUNTING MATRIX ADVISORY SUPPORT AND MONITORING ASSISTANCE

SEKILAS

Kilasn tentang
Proyek SAMASAMA

Di semester terakhir tahun 2008 indikator ekonomi makro Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan terkait dengan krisis keuangan global.

Dengan mempertimbangkan potensi dampak resesi terhadap perekonomian Indonesia dan pasar tenaga kerjanya, Pemerintah Indonesia secara cepat merespons dengan mengeluarkan paket stimulus fiskal sebesar Rp 73,2 triliun (US\$ 7,6 miliar) atau 1,4 persen dari PDB pada Januari 2009.

Paket yang dikeluarkan mencakup pemotongan pajak, subsidi pajak dan penciptaan lapangan kerja untuk mempertahankan daya beli, mencegah pemutusan kerja dan menstimulasi penciptaan lapangan kerja (lihat grafik).

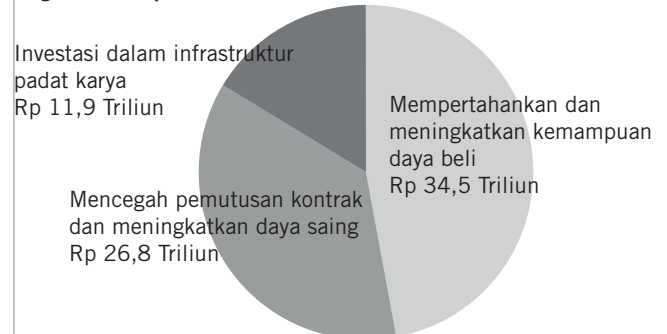
Penting bagi Indonesia untuk menggunakan stimulus tidak hanya untuk merespons gelombang kejutan saat ini, tapi juga meningkatkan daya tahan perekonomian secara keseluruhan serta memastikan bahwa paket stimulus sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan.

Investasi stimulus mencakup Rp 11,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan investasi ini ditujukan untuk menciptakan kurang lebih satu juta kesempatan kerja jangka pendek melalui penggunaan pendekatan pembangunan padat karya. Paket tersebut menyalurkan investasi ke dalam proyek-proyek infrastruktur sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum;
2. Pembangunan infrastruktur komunikasi;
3. Pembangunan infrastruktur energi;
4. Pembangunan infrastruktur perumahan;
5. Pembangunan infrastruktur pasar;
6. Konstruksi dan rehabilitasi jalan pertanian dan infrastruktur irigasi;
7. Peningkatan pelatihan khusus;
8. Rehabilitasi gudang-gudang untuk penyimpanan bahan baku.

Data yang ada mengindikasikan bahwa krisis terkait dengan kejatuhan pada

Bagan 1: Komponen Paket Stimulus Fiskal



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2009

aktivitas ekspor dan pertumbuhan pada perekonomian informal perekonomian. Hasil perkiraan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di perekonomian informal meningkat menjadi kurang lebih dua juta orang. Bagaimanapun, dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, dampak krisis tersebut terhadap perekonomian terbilang tidak terlalu besar. Pemilihan umum dan peningkatan indeks kepercayaan konsumen berkontribusi pada konsumsi domestik, dengan nilai hampir 60 persen dari PDB.

Pemerintah melakukan usaha yang cukup keras dalam menerapkan paket stimulus, dengan pencapaian sebesar 84 persen dari target yang ditentukan.

Keberadaan stimulus fiskal menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penentuan kebijakan untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan kebijakan dapat mengoptimalkan hasil pembangunan.

ISU MARET 2010

Respons Indonesia terhadap Krisis Global

Proyek SAMASAMA

Pengembangan Alat Analisis untuk Mendorong Pembangunan Padat Karya

Apakah Sisytem Neraca Sosial Ekonomi?

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Projek SAMASAMA

Kenaikan investasi infrastruktur merupakan salah satu aspek yang termasuk dalam Paket Stimulus Fiskal 2009 yang ditujukan untuk mendorong permintaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja masyarakat Indonesia. Dengan adanya investasi senilai Rp 12,2 triliun tersebut, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dampak dan efektivitas dari investasi pemerintah tersebut.

Atas permintaan Pemerintah Indonesia, dibentuklah Proyek SAMASAMA yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis efektivitas investasi pemerintah. Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan efektivitas kebijakan investasi publik yang mendorong kemampuan pemerintah dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan investasi publik yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan ini, proyek ini meningkatkan kapasitas evaluasi kebijakan melalui pengembangan “Sistem Neraca Sosial Ekonomi Dinamis”

(*dynamic social accounting matrix / DySAM*). Alat analisis ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap dampak-dampak yang terjadi akibat ditetapkannya suatu kebijakan investasi publik terhadap pasar tenaga kerja. Alat analisis ini dapat digunakan untuk melakukan simulasi bagi para pembuat kebijakan untuk mengetahui pengaruh strategi pemerintah dan belanja negara terhadap peningkatan kerja dan produktivitas yang menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal-hal utama dalam proyek ini antara lain:

- Pengembangan Dinamis SNSE yang meliputi akun satelit lapangan kerja dan informasi yang dikembangkan untuk mendalami pilihan teknologi yang digunakan;
- Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengguna;
- Studi yang berorientasi kebijakan khususnya terkait ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek SAMASAMA antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Biro Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Bank Indonesia. Dalam memastikan keberlanjutan dan mendukung kegiatan pembanunan kapasitas yang akan datang, Universitas Indonesia juga dilibatkan, khususnya untuk program pelatihan untuk pelatih.

Kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan berupa pengembangan Dinamis SNSE dan perluasan jumlah pengguna melalui kegiatan pelatihan. Dukungan juga diberikan pada para pemangku kepentingan untuk menerapkannya sebagai model analisis kebijakan dalam menelaah dampak ekonomi terhadap kejutan keuangan, perubahan iklim, pilihan investasi guna mencapai target ketenagakerjaan dan implikasi terhadap perjanjian perdagangan bebas.

PENGEMBANGAN ALAT ANALISIS UNTUK MENDORONG PEMBANGUNAN PADAT KARYA

Penciptaan lapangan kerja adalah strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan di negara-negara berkembang. Strategi ini mengacu pada alasan bahwa pendapatan upah merupakan sumber pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin. Karenanya, penciptaan lapangan kerja dan/atau peningkatan pendapatan upah pekerja merupakan strategi utama dalam mengurangi kemiskinan. Strategi pengurangan kemiskinan seperti itu dapat mendorong proyek investasi yang mensyaratkan tercapainya penurunan tingkat kemiskinan yang disepakati dengan meningkatkan manfaat bagi pekerja. Karena investasi merupakan faktor penentu penciptaan lapangan kerja, maka pertanyaan yang kerap muncul selalu terkait efisiensi dari investasi tersebut terhadap total penciptaan lapangan kerja.

Berbagai jenis alat analisis dapat digunakan untuk menilai dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Walau demikian, karena investasi merupakan salah satu komponen pembentuk permintaan agregat nasional, pendekatan dorongan permintaan (*multiplier*) Keynesian merupakan pilihan yang tepat untuk memahami hal tersebut. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) (*Social Accounting Matrix / SAM*) yang mengacu pada metodologi *input-output* merupakan program neraca yang dapat memfasilitasi pendekatan tersebut.

SNSE menggabungkan data pendapatan dan produksi seperti yang terdapat pada neraca nasional dan tabel *input-output*, dan juga mencakup informasi terkait pendapatan dan pengeluaran berbagai lembaga/institusi. SNSE dapat digunakan untuk mendukung proses pengembangan strategi nasional yang relevan dengan menganalisis dampak dari rencana investasi terhadap perekonomian. SNSE dapat digunakan untuk mengetahui secara lebih mendalam hubungan antara strategi pekerjaan yang intensif, penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.



Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) (*Social accounting matrix / SAM*) merupakan sistem neraca ekonomi yang bersifat money-metric dan double-entry yang mencatat seluruh transaksi antar pelaku, institusi dan produksi yang terjadi dalam suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu. SNSE menggambarkan informasi terkait input dan output, konsumsi rumah tangga, subsidi yang diberikan pemerintah untuk produksi dan institusi, pengiriman uang pekerja (*remittance*), serta ekspor dan impor dan lain-lain (lihat tabel di bawah). SNSE dapat menjadi kerangka kerja untuk menggambarkan dan menganalisis struktur sosial-ekonomi dalam perekonomian. SNSE adalah alat analisis yang dapat mensimulasikan potensi dampak dari kebijakan ekonomi terhadap pekerjaan dan distribusi pendapatan dengan menggunakan analisis *multiplier*. “*Dinamis SNSE*” mengacu pada SNSE yang bersifat statis dan data deret waktu yang terbaru dalam neraca nasional. Hal ini menyebabkan model tersebut dinamis terhadap perubahan waktu.

Dalam kerangka SNSE terdapat variabel endogen dan eksogen seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Jika terdapat perubahan pada variabel eksogen, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap variabel endogen dapat dilihat melalui sistem SNSE yang bersifat interdependen.

Tabel: Skema Sistem Neraca Sosial Ekonomi

	Pengeluaran	Endogen				Eksogen			
		Komoditas	Produksi	Faktor produksi	Rumah tangga (RT)	Perusahaan	Pemerintah	Neraca modal	Seluruh dunia (SD)
Endogen	Komoditas		Input		Konsumsi RT		Konsumsi pemerintah	Pembentukan modal	Ekspor
	Produksi	Output					Subsidi produksi		
	Faktor produksi		Upah /keuntungan						Upah /keuntungan SD
	Rumah tangga (RT)			Transfer upah /keuntungan	RT ke RT	Perusahaan ke RT	Subsidi RT		Pengiriman uang
Eksogen	Perusahaan			Transfer keuntungan	RT ke Perusahaan	Perusahaan ke perusahaan	Subsidi pemerintah		SD ke perusahaan
	Pemerintah	Bea Cukai /Pajak Impor			Pajak RT	Pajak perusahaan	Pemerintah ke pemerintah		SD ke pemerintah
	Neraca modal				Tabungan RT	Modal perusahaan	Defisit / surplus		Tabungan / utang luar negeri
	Seluruh dunia (SD)	Impor		Transfer upah /keuntungan ke SD	RT ke SD	Perusahaan ke SD	Pembayaran bunga	Cadangan impor	

Kerangka SNSE Indonesia dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari perubahan terhadap daerah perkotaan dan perdesaan, dan juga rumah tangga berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Selain itu, SNSE dapat digunakan untuk mengindikasikan secara spesifik sektor ekonomi yang akan memberikan keuntungan dari perubahan dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi transfer bagi tenaga kerja. Tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi dapat digunakan untuk menghubungkan *money-metric* Dinamis SNSE dan statistik ketenagakerjaan. Kemudian angka pengganda tenaga kerja (*labour multipliers*) dapat menunjukkan bagaimana perubahan berpengaruh pada tingkat tenaga kerja.

Dampak dari analisis angka pengganda SNSE dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Dampak intra-akun (*intra-account effect*) dan 2) Dampak Tarikan (*induced effect*). Dampak intra-akun merupakan dampak dari perubahan pada satu akun, ditambah dampak dalam grup akun tersebut. Contohnya, jika subsidi diberikan untuk aktivitas produksi minyak, angka pengganda intra-akun akan mendeteksi pengaruh subsidi pada aktivitas produksi minyak dan pengaruh pada semua aktivitas produksi. Dampak tarikan mengukur pengaruh perubahan pada akun lainnya (seperti rumah tangga, komoditas, dan faktor produksi ketika akun produksi dimanipulasi), seperti halnya pengaruh lebih lanjut yang muncul saat suntikan dilakukan memicu perubahan terhadap perekonomian.

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting untuk stabilitas dan memahami bahwa dukungan diperlukan untuk membantu terwujudnya sinergi yang dapat mengharmonisasikan dan mengoptimalkan kebijakan pembangunan.

Kemenko Perekonomian merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengoordinasikan kerangka kebijakan ekonomi dan implementasinya. Kemenko Perekonomian mendukung koordinasi antar sektor kunci termasuk makroekonomi dan keuangan, perta-

nian dan kelautan, pengelolaan sumber daya alam, perindustrian dan perdagangan, kerjasama internasional, dan pembangunan infrastruktur.

Kemenko Perekonomian memahami bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur melalui investasi pemerintah, asistensi pembangunan, dan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dapat menciptakan kontribusi yang penting bagi perbaikan iklim investasi nasional dan persaingan ekonomi di pasar internasional. Kedeputan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Kedeputan V), Kemenko Perekonomian,

bertanggungjawab mengoordinasikan kebijakan serta memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Kedeputan V juga mendukung pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan investasi infrastruktur Indonesia. Kedeputan ini berkontribusi bagi tujuan pembangunan Indonesia yang lebih luas dengan cara mendukung koordinasi dan promosi pada kegiatan penciptaan kerja melalui kegiatan yang terkait infrastruktur dan pengembangan wilayah di seluruh pemerintahan.



Program Investasi Padat Karya ILO

Program Investasi Padat Karya merupakan program berskala global dari ILO, yang mengarahkan program kegiatan pembangunan dan pendekatan padat karya menjadi bagian dari investasi infrastruktur. Program ini mendukung pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, sektor swasta, dan lembaga masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja melalui investasi infrastruktur dan meningkatkan akses kaum miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Program ini memfasilitasi perumusan kebijakan dan penetapan standar dalam mendukung penciptaan kerja, mengembangkan kewirausahaan, men-

ingkatkan kapasitas serta komunikasi sosial melalui kegiatan infrastruktur. Program ini dapat diterapkan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, selama masa krisis dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang bagi pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan perekonomian dan institusi.

Di Indonesia, program ini mendukung peningkatan kapasitas bagi pemerintah kabupaten, kontraktor daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan pendekatan pembangunan berbasis sumber daya lokal dan padat karya pada pembangunan jaringan jalan perdesaan di Aceh dan Sumatera Utara. Keg-

iatan ini mencoba untuk meningkatkan akses perdesaan dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin perdesaan. Program kegiatan ini telah memperkenalkan teknologi ramah lingkungan, seperti teknologi emulsi aspal, dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan jalan.

Di tingkat nasional, program ini telah mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur terkait program penciptaan lapangan kerja serta pembangunan sistem pengawasan untuk mendukung peningkatan kualitas lapangan kerja yang tercipta melalui program pekerjaan umum dan pemberdayaan masyarakat.

Informasi ini disusun oleh Emma Allen, Christoph Ernst, Wahyu Utomo, Enoch Suharto Pranoto, Arif Kelana Putra, dan Galuh Gayatri. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Emma Allen
Kantor Perwakilan ILO Untuk Indonesia dan Timor Leste
Program Investasi Padat Karya
Menara Thamrin, Lantai 22
JI M. H. Thamrin Kav. 3,
Jakarta 10250
Email: allen@ilo.org
Situs: www.ilo.org/jakarta

Enoch Suharto Pranoto
Kedeputan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta Pusat 10710
Email: enoh@ekon.go.id